



Analisis Kebijakan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam

Iwan Aprianto

Universitas Islam Mamba'ul Ulum
iwanapriantoa@gmail.com

M. Shoffa Saifillah AF

Universitas Islam Mamba'ul Ulum
ahmadmuhammad593@gmail.com

Nurhasanah

Universitas Islam Mamba'ul Ulum
ardinur770@gmail.com

Sinta Kistinawati

Universitas Islam Mamba'ul Ulum
shintaarhan07@gmail.com

Nur Saniah

Universitas Islam Mamba'ul Ulum
saniahnur47@gmail.com

Naskah Masuk	Direvis	Diterbitkan
24-12-2025	12-01-2025	01-02-2026

ABSTRACT

Islamic education plays a strategic role in shaping human resources with faith, knowledge, and moral character. This study aims to analyze financial management policies and educator welfare in Islamic educational institutions. Using a qualitative-descriptive approach, data were collected through library research and analyzed via content analysis. Findings indicate that effective financial management involves planning, budgeting, implementation, supervision, and accountability, guided by principles of transparency, justice, efficiency, and sustainability. However, challenges remain, including manual record-keeping, weak internal control, dependence on student fees, and inadequate teacher welfare. Integrating financial management with improved educator welfare enhances motivation, professionalism, and learning quality. Strengthening managerial capacity, digitalizing financial systems, diversifying funding sources, and implementing fair, sustainable policies are essential to ensure high-quality, competitive, and sustainable Islamic education.

Keyword: Islamic Education, Financial Management, Teacher Welfare, Policy

ABSTRAK

Pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pembiayaan dan kesejahteraan pendidik di lembaga pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan analisis isi. Hasil menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan efektif meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Kendala utama meliputi pencatatan manual, pengawasan internal lemah, ketergantungan pada iuran siswa, serta kesejahteraan guru yang rendah. Integrasi pembiayaan dengan peningkatan kesejahteraan guru meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan mutu pembelajaran. Penguatan kapasitas manajerial, digitalisasi keuangan, diversifikasi sumber dana, dan kebijakan berkeadilan menjadi kunci terciptanya pendidikan Islam yang berkualitas, berkelanjutan, dan kompetitif.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Manajemen Pembiayaan, Kesejahteraan Guru, Kebijakan

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Dalam perkembangan global saat ini, pendidikan Islam dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas kelembagaan, profesionalisme guru, serta efektivitas pengelolaan sumber daya. Dua aspek yang sangat menentukan keberhasilan lembaga pendidikan Islam adalah manajemen pembiayaan dan kesejahteraan pendidik, karena keduanya berpengaruh langsung terhadap mutu layanan pendidikan dan keberlanjutan penyelenggaraan pembelajaran.

Manajemen pembiayaan pendidikan Islam tidak sekadar mengatur pemasukan dan pengeluaran, tetapi mencakup perencanaan, pengalokasian, evaluasi, serta transparansi dana yang digunakan. Ketidaktepatan dalam pengelolaan dana dapat menyebabkan penyediaan sarana terbatas, kurangnya pengembangan profesional guru, serta menurunnya kualitas pembelajaran. Sementara itu, kesejahteraan guru juga menjadi problematik utama dalam pendidikan Islam, terutama pada madrasah swasta dan pesantren yang masih mengandalkan sumber dana terbatas. Banyak tenaga pendidik menerima honorarium yang tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka, sehingga memengaruhi motivasi dan stabilitas kualitas pembelajaran.¹

Dalam perspektif Islam, pengelolaan dana pendidikan merupakan amanah besar. Allah menegaskan pentingnya amanah dan keadilan dalam mengelola segala bentuk urusan, termasuk harta lembaga pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلِيهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya dengan adil.” (Q.S. An-Nisa: 58)²

Ayat ini sangat relevan dengan manajemen pembiayaan dan kesejahteraan pendidikan Islam, karena dana pendidikan dan kesejahteraan guru adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan integritas. Ketika amanah ini diabaikan, muncul ketimpangan, rendahnya kualitas pendidikan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.³

Selain aspek normatif, kebijakan pemerintah terkait pendanaan juga menjadi faktor penting dalam problematik pendidikan Islam. Meskipun pemerintah menyediakan bantuan seperti

¹ Mubarak, H. (2019). *Transparansi dan amanah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam*. Lembaga Kajian Pendidikan Syariah, hlm. 12.

² Al-Qur'an, Surah An-Nisa': 58.

³ Tafsir Al-Jalalayn. (2000). Surah An-Nisa': 58. Jakarta: Pustaka Arafah, hlm. 102.

BOS, BOP, dan tunjangan untuk guru, distribusi yang belum merata dan besaran yang masih terbatas membuat banyak lembaga pendidikan Islam harus bertahan dengan anggaran minimal. Keterbatasan ini semakin terlihat pada lembaga pendidikan kecil dan swasta yang harus mengelola pembiayaan secara mandiri.

Karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai kebijakan pembiayaan, problem kesejahteraan, serta tantangan manajerial yang dihadapi lembaga pendidikan Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif sekaligus membuka ruang solusi agar pendidikan Islam mampu bersaing, berkembang secara berkelanjutan, dan memberikan kesejahteraan yang layak bagi para pendidiknya.⁴

Namun, tantangan manajemen pembiayaan pendidikan Islam tidak hanya berada pada aspek ketersediaan dana, tetapi juga kualitas tata kelolanya. Banyak lembaga pendidikan Islam belum memiliki sistem administrasi keuangan yang profesional, terdokumentasi, dan akuntabel. Pengelolaan dana yang masih bersifat tradisional, kurangnya kemampuan analisis anggaran, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital menyebabkan proses perencanaan dan pelaporan tidak dilakukan secara sistematis. Kondisi ini dapat memicu terjadinya inefisiensi, pemborosan anggaran, atau ketidakjelasan alokasi dana. Di samping itu, masih ditemukan kelembagaan pendidikan Islam yang belum menerapkan prinsip transparansi kepada publik, sehingga masyarakat kurang mengetahui bagaimana dana digunakan. Padahal, kepercayaan masyarakat merupakan kekuatan besar yang sangat menentukan keberlangsungan peran lembaga pendidikan Islam.

Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan juga merupakan persoalan mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan pembiayaan. Rendahnya tingkat kesejahteraan guru berimplikasi langsung pada rendahnya motivasi mengajar, terbatasnya kesempatan pengembangan profesional, dan kurangnya stabilitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Banyak guru di madrasah swasta, misalnya, masih menerima honorarium yang jauh di bawah standar kelayakan. Hal ini semakin diperparah oleh ketergantungan lembaga pada sistem subsidi internal atau iuran peserta didik yang tidak selalu stabil. Padahal, peningkatan mutu pendidikan sangat terkait dengan kesejahteraan guru. Sebagaimana ditegaskan berbagai penelitian, guru yang sejahtera akan menunjukkan kinerja lebih optimal, kreatif, dan berdedikasi dalam mengembangkan pembelajaran. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan guru bukan sekadar kebutuhan sosial, tetapi juga strategi penting dalam peningkatan kualitas pendidikan Islam.

⁴ Malik, S. (2018). Prinsip keadilan dan efisiensi dalam alokasi pembiayaan pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 4(3), hlm. 45.

Dinamika kebijakan pemerintah mengenai pendanaan pendidikan Islam juga berpengaruh besar terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan Islam. Walaupun pemerintah telah memberikan berbagai bentuk dukungan, seperti BOS, tunjangan guru, hingga bantuan operasional kelembagaan, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa bantuan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendasar lembaga pendidikan Islam. Banyak kebijakan pendanaan yang belum responsif terhadap kondisi riil lembaga kecil dan daerah terpencil. Selain itu, perbedaan perlakuan antara lembaga berstatus negeri dan swasta menimbulkan ketimpangan dalam kualitas pembiayaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, perlu ada reformasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkeadilan dalam penganggaran pendidikan Islam, termasuk peningkatan alokasi dana, penyederhanaan mekanisme penyaluran, serta sistem evaluasi yang lebih proporsional. ⁵Dalam kerangka besar ini, kajian mengenai manajemen pembiayaan dan problematika kesejahteraan dalam pendidikan Islam menjadi sangat mendesak untuk dilakukan secara sistematis dan berbasis data.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan secara mendalam mengenai kebijakan pembiayaan dan problematika kesejahteraan dalam pendidikan Islam. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif berdasarkan konteks, teori, regulasi, serta temuan penelitian terdahulu. Fokus penelitian ini bukan pada pengukuran statistik, melainkan pendalaman konsep, fenomena, dan isu-isu yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan serta kesejahteraan pendidik dalam lembaga pendidikan Islam. ⁶

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran sistematis mengenai bagaimana proses pembiayaan pendidikan Islam dikelola, bagaimana kebijakan diterapkan, serta bagaimana permasalahan kesejahteraan guru muncul dalam praktik penyelenggaraan pendidikan. Penelitian deskriptif memungkinkan peneliti menelusuri fakta, menganalisis hubungan antarkomponen pembiayaan, serta memetakan tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam secara objektif tanpa melakukan manipulasi variabel. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk

⁵ Sholihah, L. M. (2020). Kesejahteraan guru dan peningkatan mutu pembelajaran di madrasah swasta. *Jurnal Profesionalitas Pendidikan Islam*, 6(1), hlm. 33.

⁶ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 10

memberikan gambaran utuh mengenai kondisi aktual pembiayaan dan kesejahteraan pendidik di berbagai lembaga pendidikan Islam.⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data melalui berbagai sumber ilmiah yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian. Sumber data meliputi buku-buku manajemen pendidikan Islam, literatur ekonomi pendidikan, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta regulasi resmi pemerintah seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Agama, dan kebijakan lainnya terkait pembiayaan pendidikan Islam. Selain itu, laporan keuangan lembaga pendidikan, hasil survei kesejahteraan guru, serta dokumen kebijakan organisasi penyelenggara pendidikan Islam juga dijadikan rujukan dalam analisis.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, peneliti menentukan fokus kajian berdasarkan isu-isu utama dalam pembiayaan dan kesejahteraan pendidikan Islam. Kedua, peneliti menelusuri dan memilih literatur ilmiah yang relevan untuk dijadikan dasar teoretis dan data pendukung. Ketiga, data diklasifikasikan dan dianalisis menggunakan teknik *content analysis* (*analisis isi*), yaitu proses membaca, mengidentifikasi tema, serta menemukan pola-pola penting dalam literatur. Keempat, peneliti melakukan sintesis konsep untuk menghubungkan teori, kebijakan, dan temuan penelitian sebelumnya sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang manajemen pembiayaan dan problematika kesejahteraan dalam pendidikan Islam.⁸

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan cara membandingkan informasi dari berbagai literatur yang berbeda. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh tidak bias dan memiliki landasan akademik yang kuat. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari karya ilmiah, peraturan pemerintah, dan laporan penelitian. Selain itu, kredibilitas data diperkuat melalui pemilihan sumber referensi terbaru yang relevan dengan kondisi pendidikan Islam saat ini.⁹

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan pembiayaan diterapkan, bagaimana problematika kesejahteraan pendidik muncul, serta bagaimana strategi pengelolaan yang ideal dapat diterapkan dalam pendidikan Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,

⁷ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 12

⁸ Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 45

⁹ Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 225

penelitian ini diharapkan mampu menyajikan analisis yang kaya, mendalam, dan relevan untuk pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan Islam di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan Islam dipahami sebagai rangkaian proses sistematis mulai dari perencanaan, pengalokasian, penggunaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban yang berorientasi pada tujuan pendidikan serta nilai-nilai syariah. Penelitian Husni Mubarak menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip amanah, keadilan, dan transparansi karena lembaga pendidikan mengelola dana publik dan dana umat. Temuan penelitian ini menguatkan pandangan tersebut bahwa pembiayaan harus dipandang sebagai fondasi utama yang menentukan keberlangsungan lembaga pendidikan, bukan hanya sebagai kegiatan administratif yang bersifat rutin.¹⁰

Selain itu, konsep pembiayaan pendidikan Islam juga berkaitan erat dengan kemampuan lembaga menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional jangka pendek dan pengembangan jangka panjang. Temuan Nurhayati Ramdhan menunjukkan bahwa lembaga yang memiliki pemahaman konsep pembiayaan modern cenderung lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pendidikan dan mampu merancang program strategis yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa definisi pembiayaan tidak berhenti pada kegiatan alokasi dana, tetapi mencakup kapasitas manajerial dan komitmen terhadap nilai-nilai syariah.¹¹

2. Ruang Lingkup Pembiayaan dalam Pendidikan Islam

Penelitian ini menemukan bahwa ruang lingkup pembiayaan pendidikan Islam mencakup lima komponen utama: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Menurut Ridwan Azhar kelima komponen ini harus berjalan secara terstruktur dan saling melengkapi untuk mencapai efektivitas dalam penggunaan dana. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa sebagian lembaga pendidikan Islam telah menerapkan tahapan perencanaan dan penganggaran, namun belum mengintegrasikan proses evaluasi dan pengawasan secara optimal. Hal ini menyebabkan beberapa program tidak berjalan sesuai rencana atau mengalami ketidaktepatan dalam alokasi anggaran.¹²

¹⁰ Husni Mubarak, *Transparansi dan amanah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Pendidikan Syariah, 2019), hlm. 12.

¹¹ Nurhayati Ramdhan, *Konsep manajemen pembiayaan berbasis nilai-nilai syariah pada lembaga pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Ilmiah Madani, 2021), hlm. 45.

¹² Ridwan Azhar, "Transparansi pelaporan dan akses informasi keuangan madrasah," *Jurnal Tata Kelola Pendidikan Islam*, 5(2), 2020, hlm. 23.

Ruang lingkup pembiayaan juga mencakup upaya lembaga dalam mencari, mengembangkan, dan mengoptimalkan sumber dana alternatif seperti wakaf produktif, zakat pendidikan, dan donasi masyarakat. Menurut penelitian Dahlia Firdaus sumber-sumber dana filantropi Islam ini sangat potensial untuk memperkuat kemandirian lembaga, tetapi masih minim dimanfaatkan karena keterbatasan kapasitas manajerial. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa ruang lingkup pembiayaan belum sepenuhnya dipahami secara luas oleh pengelola sekolah dan madrasah, sehingga memerlukan penguatan kapasitas, pelatihan, serta literasi keuangan yang lebih baik.¹³

3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Pendidikan Islam

Penelitian menunjukkan bahwa prinsip utama pembiayaan pendidikan Islam meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Nurhayati Ramdhan menekankan bahwa transparansi diperlukan untuk membangun kepercayaan publik, terutama karena lembaga pendidikan Islam sering bergantung pada dukungan masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa lembaga yang menerapkan keterbukaan informasi anggaran cenderung mendapatkan dukungan finansial yang lebih stabil karena publik merasa yakin terhadap pengelolaan dana. Prinsip akuntabilitas juga menjadi temuan penting karena lembaga yang memiliki sistem pertanggungjawaban rapi dapat mengurangi risiko penyimpangan dana.¹⁴

Sementara itu, prinsip keadilan dan efisiensi sangat menentukan keberhasilan program pendidikan. Penelitian Syarifudin Malik menyebutkan bahwa keadilan dalam alokasi dana tidak hanya terkait pembagian anggaran antarprogram, tetapi juga mencakup kesejahteraan tenaga pendidik yang sering kali terabaikan. Temuan penelitian ini menguatkan bahwa lembaga yang mengedepankan prinsip keadilan menunjukkan kinerja pendidikan yang lebih baik karena guru merasa dihargai dan didukung. Prinsip keberlanjutan juga menjadi hal penting untuk memastikan lembaga tidak hanya bergantung pada satu sumber dana saja.¹⁵

4. Problematik Pembiayaan Pendidikan Islam

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa problem utama dalam pembiayaan pendidikan Islam, terutama pada lembaga swasta dan pesantren kecil. Penelitian Rohman Jauhari mengungkapkan bahwa ketergantungan pada iuran peserta didik menyebabkan lembaga tidak memiliki fleksibilitas anggaran untuk mengembangkan kualitas sarana, pelatihan guru, dan inovasi pembelajaran. Ketidakstabilan pendapatan lembaga menjadi hambatan yang signifikan, terutama

¹³ Dahlia Firdaus, *Pencatatan manual dan problematika dokumentasi keuangan lembaga pendidikan Islam* (Jakarta: Al-Falah Press, 2019), hlm. 30.

¹⁴ Nurhayati Ramdhan, *Konsep manajemen pembiayaan berbasis nilai-nilai syariah pada lembaga pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Ilmiah Madani, 2021), hlm. 57

¹⁵ Syarifudin Malik, "Prinsip keadilan dan efisiensi dalam alokasi pembiayaan pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 4(3), 2018, hlm. 15.

ketika peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu sehingga tidak semua iuran dapat terpenuhi tepat waktu. Selain itu, lembaga sering menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan mendadak akibat nihilnya dana cadangan.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah lemahnya sistem administrasi keuangan dan minimnya pelatihan manajemen keuangan. penggunaan metode pencatatan manual menyebabkan banyak lembaga tidak memiliki dokumentasi keuangan yang rapi dan valid. Temuan penelitian ini memperkuat bahwa pembiayaan pendidikan Islam tidak hanya bermasalah pada jumlah dana, tetapi juga pada sistem manajemen internal yang belum profesional, kurang terdigitalisasi, dan belum berorientasi jangka panjang.¹⁶

5. Problematik Kesejahteraan Guru dalam Pendidikan Islam

Masalah kesejahteraan guru ditemukan sebagai problem yang paling dominan dalam pendidikan Islam saat ini. Berdasarkan penelitian Laila Maratus Sholihah banyak guru madrasah swasta mendapatkan honorarium yang tidak mencukupi kebutuhan dasar karena lembaga tidak memiliki pendanaan stabil. Hal ini berdampak pada rendahnya motivasi, berkurangnya komitmen kerja, dan terbatasnya kemampuan guru dalam mengembangkan diri melalui pelatihan profesional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan guru memiliki hubungan langsung dengan kualitas pendidikan yang dihasilkan.¹⁷

Temuan penelitian Rahmiatul Azizah menambahkan bahwa ketidakadilan kesejahteraan antar lembaga menjadi sumber ketimpangan mutu pendidikan Islam secara nasional. Guru di lembaga negeri cenderung mendapatkan tunjangan dan fasilitas yang lebih baik dibanding guru di lembaga swasta, terutama yang dikelola mandiri oleh yayasan kecil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesejahteraan guru tidak dapat ditingkatkan tanpa memperbaiki struktur pembiayaan lembaga, diversifikasi sumber pendanaan, dan reformasi kebijakan subsidi untuk guru di lembaga swasta.¹⁸

1. Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan

Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan Islam mencerminkan tingkat kesiapan lembaga dalam mengelola keuangan secara professional. Sebagian besar lembaga pendidikan Islam skala kecil masih menggunakan mekanisme pencatatan manual sehingga rentan terjadi ketidaksesuaian antara laporan penggunaan dana dan realisasi kegiatan. Kondisi ini berbeda dengan

¹⁶ Rohman Jauhari, "Penguatan SOP keuangan dan peran unit pengawasan internal di madrasah," *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan Islam*, 6(2), 2022, hlm. 9.

¹⁷ Laila Maratus Sholihah, "Kesejahteraan guru dan peningkatan mutu pembelajaran di madrasah swasta," *Jurnal Profesionalitas Pendidikan Islam*, 6(1), 2020, hlm. 21.

¹⁸ Rahmiatul Azizah, "Evaluasi pelaksanaan anggaran dan dampaknya terhadap mutu pembelajaran di lembaga pendidikan Islam," *Jurnal Evaluasi Pendidikan Islam*, 4(1), 2022, hlm. 33.

lembaga yang telah menggunakan sistem digital berbasis akuntansi, yang menghasilkan laporan lebih akurat dan mudah diverifikasi¹⁹. M. Ridwan Azhar juga mengemukakan bahwa ketergantungan lembaga pada sumber dana tunggal, khususnya dana BOS, membuat implementasi pembiayaan menjadi kurang stabil dan tidak fleksibel terhadap kebutuhan mendesak.²⁰

Beberapa aspek penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi dapat dilihat melalui indikator berikut:

1. Ketersediaan SDM yang memahami manajemen keuangan;
2. Pemanfaatan teknologi digital untuk pencatatan dan pelaporan;
3. Ketersediaan SOP keuangan yang jelas;
4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan;
5. Kemampuan lembaga menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Ilham Fajrullah menegaskan bahwa lembaga yang menerapkan pelaporan terbuka kepada publik mengalami peningkatan kepercayaan masyarakat dan dukungan dana.²¹ Dalam konteks SDM, Rohman Jauhari mengungkapkan bahwa banyak bendahara madrasah tidak memiliki latar belakang akuntansi sehingga mengalami kesulitan dalam pelaporan standar. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi serta pemenuhan perangkat administrasi yang lebih modern agar implementasi pembiayaan berjalan efektif.²²

2. Perencanaan dan Penganggaran Dana Pendidikan Islam

Perencanaan anggaran merupakan fondasi bagi keberhasilan pengelolaan pembiayaan di lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan kajian Dahlia Firdaus, perencanaan keuangan di sebagian besar madrasah belum didukung oleh analisis kebutuhan berbasis data. RKAS sering disusun hanya dengan menyalin bentuk anggaran tahun sebelumnya tanpa mengidentifikasi kebutuhan baru. Hal ini berpotensi menghasilkan anggaran yang tidak sesuai dengan realitas kebutuhan lembaga.²³ Ridwan Azhar menambahkan bahwa ketidakakuratan data menyebabkan lembaga sulit menyiapkan strategi jangka panjang untuk pengembangan mutu.

Penganggaran yang optimal harus memperhatikan beberapa komponen utama:

1. Analisis kebutuhan mendalam berdasarkan data nyata;

¹⁹ Husni Mubarak, *Transparansi dan amanah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Pendidikan Syariah, 2019), hlm. 22

²⁰ Ridwan Azhar, "Transparansi pelaporan dan akses informasi keuangan madrasah," *Jurnal Tata Kelola Pendidikan Islam*, 5(2), 2020, hlm. 32

²¹ Muhammad Ilham Fajrullah, "Digitalisasi pengawasan dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan Islam," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Syariah*, 9(1), 2023, hlm. 27.

²² Rohman Jauhari, "Penguatan SOP keuangan dan peran unit pengawasan internal di madrasah," *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan Islam*, 6(2), 2022, hlm. 15.

²³ Dahlia Firdaus, *Pencatatan manual dan problematika dokumentasi keuangan lembaga pendidikan Islam* (Jakarta: Al-Falah Press, 2019), hlm. 28.

2. Penentuan skala prioritas yang jelas;
3. Alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
4. Rencana cadangan dana darurat;
5. Diversifikasi sumber pendanaan lembaga.²⁴

Menurut Yusuf Mahendra diversifikasi pendanaan melalui wakaf produktif, zakat pendidikan, dan filantropi syariah telah terbukti meningkatkan stabilitas keuangan lembaga secara berkelanjutan. Beliau juga mengatakan bahwa lembaga yang mampu mengelola wakaf produktif secara profesional dapat membiayai program-program pengembangan tanpa bergantung pada iuran peserta didik. Selain itu lembaga yang menyisihkan anggaran untuk pelatihan guru mengalami peningkatan kualitas pembelajaran yang signifikan.²⁵

3. Pelaksanaan Anggaran dan Efektivitas Pembiayaan

Pelaksanaan anggaran menuntut konsistensi tinggi antara rencana dan realisasi. Rahmiatul Azizah menyatakan bahwa ketidakkonsistenan terjadi ketika lembaga memindahkan anggaran pengembangan untuk menutupi kebutuhan mendesak. Situasi ini menyebabkan program peningkatan mutu tertunda dan kualitas pembelajaran tidak berkembang. Hal ini mengungkapkan bahwa tidak adanya mekanisme monitoring harian, mingguan, dan bulanan membuat penggunaan anggaran sulit dikontrol.²⁶

Rohman Jauhari membuktikan bahwa lembaga yang menerapkan SOP keuangan secara konsisten mampu mengurangi penyimpangan anggaran. Beliau juga menyatakan bahwa efektivitas pembiayaan harus diperkuat dengan evaluasi berbasis hasil belajar (learning outcomes), bukan hanya keberhasilan melaksanakan kegiatan. Tanpa orientasi mutu, pelaksanaan anggaran hanya menghasilkan program administratif tanpa dampak pendidikan yang berarti.

Pelaksanaan anggaran juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan yang telah ditetapkan. Banyak lembaga pendidikan Islam mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas penggunaan anggaran karena lemahnya sistem kontrol internal.²⁷ Penelitian Rahmiatul Azizah menunjukkan bahwa lembaga yang tidak memiliki unit pengawasan internal cenderung mengalami kebocoran anggaran, baik berupa penggunaan dana untuk kebutuhan yang tidak direncanakan maupun ketidaktepatan waktu

²⁴ Ridwan Azhar, "Transparansi pelaporan dan akses informasi keuangan madrasah," *Jurnal Tata Kelola Pendidikan Islam*, 5(2), 2020, hlm. 14.

²⁵ Yusuf Mahendra, *Diversifikasi pendanaan pendidikan Islam melalui wakaf produktif dan zakat pendidikan* (Jakarta: Media Cendekia Nusantara, 2021), hlm. 68

²⁶ Rahmiatul Azizah, "Evaluasi pelaksanaan anggaran dan dampaknya terhadap mutu pembelajaran di lembaga pendidikan Islam," *Jurnal Evaluasi Pendidikan Islam*, 4(1), 2022, hlm. 11.

²⁷ Rohman Jauhari, "Penguatan SOP keuangan dan peran unit pengawasan internal di madrasah," *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan Islam*, 6(2), 2022, hlm. 19.

dalam pelaporan. Situasi ini diperparah oleh ketidakteraturan rapat koordinasi keuangan yang seharusnya menjadi forum evaluasi rutin. Tanpa forum tersebut, berbagai masalah penggunaan dana tidak dapat teridentifikasi sejak dini dan berpotensi menghambat pelaksanaan program pembelajaran. Di samping itu, efektivitas pelaksanaan anggaran juga berhubungan erat dengan kemampuan lembaga menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan.²⁸

M. Ridwan Azhar (2020) menemukan bahwa lembaga yang memiliki sistem pelaporan cepat dan transparan mampu menekan potensi penyimpangan anggaran serta meningkatkan rasa memiliki dari guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Transparansi keuangan bukan hanya berkaitan dengan pelaporan, tetapi juga mencakup pemberian akses informasi yang memadai kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan. Ketika akses informasi terbatas, proses evaluasi menjadi kurang objektif dan lembaga berisiko mengulangi kesalahan yang sama dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, akurasi data keuangan menjadi fondasi penting bagi efektivitas pengelolaan anggaran secara menyeluruh.

Pelaksanaan anggaran yang baik juga menuntut lembaga pendidikan Islam untuk mampu mengelola dana secara produktif sehingga tidak hanya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang. Penelitian Ilham Fajrullah menegaskan bahwa lembaga yang mengalokasikan sebagian anggaran untuk investasi pendidikan, seperti pengembangan sarana berbasis teknologi, perbaikan sistem administrasi, dan pelatihan guru, memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi. Tanpa pengalokasian dana untuk pengembangan jangka panjang, lembaga hanya akan terjebak pada pengeluaran rutin tanpa peningkatan kualitas. Selain itu, konsep efisiensi dan efektivitas harus diterapkan dengan mengutamakan pengeluaran yang memberikan dampak langsung terhadap mutu pembelajaran, misalnya penyediaan sarana belajar yang memadai dan peningkatan kualifikasi tenaga pengajar. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas.²⁹

4. Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pendidikan Islam

Pengawasan keuangan di lembaga pendidikan Islam perlu dijalankan secara sistematis agar penggunaan dana tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Pada saat ini banyak lembaga masih menggunakan model pengawasan sederhana tanpa dokumentasi audit. Kondisi ini menyulitkan

²⁸ Rahmiatul Azizah, "Evaluasi pelaksanaan anggaran dan dampaknya terhadap mutu pembelajaran di lembaga pendidikan Islam," *Jurnal Evaluasi Pendidikan Islam*, 4(1), 2022, hlm. 37

²⁹ Muhammad Ilham Fajrullah, "Digitalisasi pengawasan dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan Islam," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Syariah*, 9(1), 2023, hlm. 17.

proses verifikasi laporan keuangan. Komite sekolah yang seharusnya berperan sebagai pengawas eksternal sering kali tidak memiliki kemampuan teknis dalam membaca laporan keuangan. Pencatatan manual membuat dokumen mudah hilang dan sulit ditelusuri kembali.

Yusuf Mahendra menjelaskan bahwa laporan keuangan yang terbuka kepada publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Sebagian besar lembaga pendidikan Islam belum menyusun laporan sesuai standar akuntansi pendidikan, sehingga banyak laporan tidak sistematis. Digitalisasi pelaporan terbukti meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi penggunaan dana.³⁰

Pengawasan keuangan yang kuat juga membutuhkan struktur kerja yang jelas antara pimpinan, bendahara, dan unit pengawasan internal. Penelitian Rohman Jauhari (2022) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang memiliki unit pengawasan internal terlatih cenderung lebih disiplin dalam mematuhi prosedur keuangan dibandingkan lembaga yang hanya bergantung pada komite sekolah. Unit pengawasan internal yang bekerja secara sistematis dapat memastikan bahwa setiap transaksi keuangan terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Selain itu, keberadaan pedoman audit internal menjadi kunci penting untuk mencegah terjadinya manipulasi data dan menekan risiko penyalahgunaan dana. Tanpa pedoman tersebut, proses pengawasan berjalan secara subjektif dan lebih mudah dipengaruhi oleh kepentingan personal sehingga fungsi kontrol menjadi tidak efektif.

Penerapan teknologi digital dalam pengawasan keuangan juga menjadi faktor penentu dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi. Penggunaan aplikasi keuangan berbasis akuntansi pendidikan dapat mempercepat proses verifikasi laporan serta mengurangi potensi kesalahan pencatatan. Dengan digitalisasi, data transaksi dapat disimpan secara otomatis dan tersinkronisasi antarunit, sehingga audit internal maupun eksternal dapat dilakukan dengan lebih mudah. Penerapan teknologi ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga membantu lembaga menyusun laporan pertanggungjawaban yang lebih sistematis dan sesuai standar akuntansi pendidikan Islam. Ketika pengawasan dilakukan dengan pendekatan modern dan berbasis data, lembaga pendidikan Islam memiliki peluang lebih besar untuk membangun kepercayaan publik, memperluas sumber pendanaan, dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya secara berkelanjutan³¹.

³⁰ Yusuf Mahendra, *Diversifikasi pendanaan pendidikan Islam melalui wakaf produktif dan zakat pendidikan* (Jakarta: Media Cendekia Nusantara, 2021), hlm. 40.

³¹ Dahlia Firdaus, *Pencatatan manual dan problematika dokumentasi keuangan lembaga pendidikan Islam* (Jakarta: Al-Falah Press, 2019), hlm. 34.

5. Integrasi Pembiayaan dengan Kesejahteraan Pendidik

Kesejahteraan guru merupakan salah satu elemen kunci yang menentukan kualitas pendidikan. Laila Maratus Sholihah menemukan bahwa guru yang memperoleh kompensasi rendah cenderung kurang bersemangat, tidak stabil secara ekonomi, dan lebih mudah mengalami kelelahan profesional. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan kedisiplin ketergantungan lembaga pada iuran siswa mengakibatkan honor guru sering terlambat atau tidak sesuai standar.

Agar kesejahteraan pendidik meningkat, lembaga harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

1. Penyusunan standar honor berbasis beban kerja;
2. Penyediaan tunjangan profesional dan tunjangan kesehatan;
3. Akses pelatihan berkelanjutan;
4. Penghargaan terhadap prestasi guru;
5. Penguatan sistem pendanaan jangka panjang seperti dana abadi lembaga.

Lembaga yang menyediakan tunjangan pelatihan untuk guru mengalami peningkatan kinerja pendidik yang signifikan. Pentingnya pembentukan dana abadi pendidikan Islam yang dapat menjamin pembiayaan kesejahteraan guru secara berkelanjutan. Selain itu kerja sama antara pemerintah, lembaga zakat, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk membangun sistem pembiayaan yang mampu menjamin kelayakan hidup pendidik dalam jangka panjang.³²

KESIMPULAN

Manajemen pembiayaan pendidikan Islam berperan penting dalam mutu dan keberlanjutan lembaga. Sebagian besar lembaga masih menghadapi kendala, seperti pencatatan manual, SOP keuangan yang kurang jelas, ketergantungan pada dana BOS dan iuran siswa, serta perencanaan anggaran yang tidak berbasis analisis kebutuhan. Hal ini menghambat pengembangan sarana, peningkatan kompetensi guru, dan konsistensi pelaksanaan program. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas manajerial, digitalisasi sistem keuangan, mekanisme monitoring, dan audit internal. Selain itu, pengawasan yang transparan dan integrasi pembiayaan dengan kesejahteraan guru sangat penting, karena kesejahteraan pendidik memengaruhi kualitas pengajaran. Diversifikasi sumber dana, seperti wakaf produktif, zakat pendidikan, dan filantropi syariah, dapat mendukung keberlanjutan lembaga. Dengan pengelolaan keuangan profesional, lembaga pendidikan Islam

³² Laila Maratus Sholihah, "Kesejahteraan guru dan peningkatan mutu pembelajaran di madrasah swasta," *Jurnal Profesionalitas Pendidikan Islam*, 6(1), 2020, hlm. 28.

dapat meningkatkan kualitas layanan, daya saing, dan memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang unggul dan berkarakter.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih kepada para dosen, peneliti, dan akademisi yang karyanya menjadi rujukan penting dalam memperkaya analisis mengenai kebijakan, problematik, serta manajemen pembiayaan dan kesejahteraan pendidikan Islam. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya berikan kepada lembaga pendidikan dan para pendidik yang menjadi sumber inspirasi serta contoh nyata dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan pendidikan Islam di lapangan. Penulis juga mengucapkan terimakasih pada PUTAT: Jurnal Pelita Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Teknologi yang telah memfasilitasi penerbitan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Al-Quran dan Terjemahnya (2019) Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Azhar, R. (2020). Transparansi pelaporan dan akses informasi keuangan madrasah. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan Islam*, 5(2).
- Azizah, R. (2022). Evaluasi pelaksanaan anggaran dan dampaknya terhadap mutu pembelajaran di lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Evaluasi Pendidikan Islam*, 4(1).
- Fajrullah, M. I. (2023). Digitalisasi pengawasan dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan Islam. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Syariah*, 9(1).
- Firdaus, D. (2019). *Pencatatan manual dan problematika dokumentasi keuangan lembaga pendidikan Islam*. Jakarta: Al-Falah Press.
- Jauhari, R. (2022). Penguatan SOP keuangan dan peran unit pengawasan internal di madrasah. *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan Islam*, 6(2).
- Mahendra, Y. (2021). *Diversifikasi pendanaan pendidikan Islam melalui wakaf produktif dan zakat pendidikan*. Jakarta: Media Cendekia Nusantara.
- Malik, S. (2018). Prinsip keadilan dan efisiensi dalam alokasi pembiayaan pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 4(3).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, H. (2019). *Transparansi dan amanah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam*. Lembaga Kajian Pendidikan Syariah.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

-
- Ramdhan, N. (2021). *Konsep manajemen pembiayaan berbasis nilai-nilai syariah pada lembaga pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmiah Madani.
- Sholihah, L. M. (2020). Kesejahteraan guru dan peningkatan mutu pembelajaran di madrasah swasta. *Jurnal Profesionalitas Pendidikan Islam*, 6(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tafsir Al-Jalalayn. (2000). *Surah An-Nisa': 58*. Jakarta: Pustaka Arafah.